



MASYARAKAT DAN BUDAYA MEROMPAK LAUT DI SUMATERA ABAD KE-18 HINGGA ABAD KE-19

Vicky Verry Angga^{1✉}

Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang⁽¹⁾

DOI: 10.31004/aulad.vxix.xx

✉ Corresponding author:

vicky-verry@untagsmg.ac.id

Article Info

Abstrak

Kata kunci:
Bajak Laut;
Sumatera;
Perompakan

Bajak laut didefinisikan sebagai pengacau yang berkuasa di laut dan pesisir. Bajak laut berkembang sejak sebelum masehi, catatan awal kegiatan bajak laut di Nusantara ditemukan pada abad ke-5. Bajak laut terus berkembang di Nusantara pada tahun-tahun berikutnya. Sumatera sebagai wilayah ramai dengan pelayaran dan perdagangan pada abad ke-18 hingga 19 menarik kedatangan bajak laut. Permasalahan yang dimunculkan bahwa bagaimana kegiatan perdagangan dan pelayaran di Sumatera pada abad ke-18 sampai abad ke-19. Kegiatan perompakan yang dilakukan bajak laut di Sumatera pada abad ke-18 sampai abad ke-19. Keterlibatan orang Sumatera dalam aksi perompakan. Penelitian dimaksudkan sebagai upaya memperkaya kajian mengenai aktivitas bajak laut di Sumatera. Motede sejarah digunakan untuk merekonstruksi kegiatan perompakan bajak laut di Sumatera pada abad ke-18 sampai abad ke-19. Kondisi Sumatera yang ramai dengan aktivitas pelayaran dan perdagangan ternyata menarik kedatangan perompak. Bajak laut melakukan perompakan di pesisir Sumatera dan laut sekitar Sumatera secara masif selama abad ke- sampai abad ke-19. Orang Sumatera ternyata juga terlibat aktif dalam beberapa kegiatan perompakan. Orang Sumatera tidak hanya sebagai korban bajak laut namun terlibat aktif dalam beberapa kegiatan perompakan.

Abstract

Keywords:
Pirates;
Sumatra;
Piracy

Pirates are defined as troublemakers who rule the sea and coast. Pirates flourished before AD, the earliest records of pirate activity in Nusantara were discovered in the 5th century. Pirates continued to develop in Nusantara in the following years. Sumatra as a bustling region with shipping and commerce in the 18th to 19th centuries attracted the arrival of pirates. The problem arises that how trade and shipping activities in Sumatra in the 18th to 19th centuries. Piracy activities carried out by pirates in Sumatra in the 18th to 19th centuries. Sumatran involvement in piracy. The research was conducted in an effort to enrich the study of pirate activity in Sumatra. Historical motede was used to reconstruct pirate piracy activities in Sumatra in the 18th to 19th centuries. The condition of Sumatra which is crowded with shipping and trade activities turns out to attract the arrival of pirates. Pirates conducted piracy on the coast of Sumatran and the sea around Sumatra massively during the 19th century. Sumatran people were also actively involved in some piracy activities. Sumatran people are not only victims of pirates but are actively involved in some piracy activities.

1. PENDAHULUAN

Bajak laut merupakan penyamun atau pengacau di laut dan di dekat pantai. Istilah bajak laut disamakan dengan kata perompak atau ilanun atau lanun. Istilah bajak laut di Indonesia kekinian ditafsirkan sebagai tindakan yang berhubungan dengan kecurangan. Bajak laut diidentikkan dengan perilaku mengambil alih secara paksa dengan disertai ancaman (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>). Menurut Xu Ke, definisi bajak laut memunculkan kontroversi selama era kolonial bahkan sampai era kontemporer. Pada masa kolonial, bajak laut didefinisikan sebagai aktivitas yang didorong oleh tuntutan-tuntutan politik, sebagai pembenaran terhadap tindakan perluasan negara atau penjajahan (Ke, 2006: 18).

Masyarakat Nusantara pada masa kolonial menyebut aktivitas bajak laut dengan kata *lanun*. Istilah *lanun* menjadi kosakata baru di wilayah-wilayah yang pernah menjadi sasaran bajak laut dari Mangindano, Filipina Selatan (Bustami, 2004: 273). Istilah *lanun* dalam kamus bahasa Melayu dan Indonesia diartikan sebagai bajak laut atau perompak laut, tanpa menghubungkannya dengan suku bangsa Lanun. Kata *lanun* dalam bentuk majemuk perompak *lanun* berfungsi menegaskan kata pertama, bukan berarti perompak yang terdiri dari orang Lanun yang sebenarnya merupakan arti semula (Lapian, 2011: 137). Istilah *lanun* menjadi ketakutan dalam benak penduduk sungai dan pesisir di Asia Tenggara pada abad ke-17 sampai abad ke-19 (Warren, 2007: 131).

Bajak laut bermula dari jiwa petualang masyarakat untuk mencari pemenuhan kebutuhan hidupnya. Berpetualang merupakan etos masyarakat, dalam bahasa Yunani "*peirates*" yang berasal dari bahasa Latin adalah pinjaman dari kata *peirates* dalam bahasa Yunani Kuno yang berarti berusaha atau berpetualang (Lapian, 2011: 225). Bukti paling awal aktivitas bajak laut di dunia tercatat pada 1350 SM, sebuah serangan kapal bajak laut di lepas pantai Afrika Utara (Lewis, 2017: 12). Jejak aktivitas bajak laut juga dapat ditelusuri di wilayah Asia Tenggara, yang jumlahnya ternyata cukup banyak. Catatan tertulis mengenai aktivitas bajak laut di Asia Tenggara telah tercatat pada abad ke-1. Aktivitas awal bajak laut di Asia Tenggara muncul pada masa kerajaan Funan (kerajaan yang berada di sekitar Sungai Mekong) sekitar abad ke-1. Orang-orang Funan menyerang kapal-kapal yang melintasi kawasan perairan mereka pada masa itu. Raja perempuan Funan, Liu-ye, memimpin sebuah angkatan laut kerajaannya untuk menyerang kapal-kapal pedagang yang melintasi kawasan perairan Funan (Braddel, 1980: 27).

Bajak laut juga telah berkembang di Nusantara sejak abad ke-5. Catatan paling awal mengenai bajak laut di Nusantara berasal dari Fa-Hsien. Ia mencatat dalam perjalanannya pulang dari India ke Cina (antara tahun 413-414), bahwa laut di Asia Tenggara dipenuhi dengan bajak laut, siapa saja yang bertemu dengan bajak laut akan menemui ajalnya (Lapian, 2011). Raffles berpendapat bahwa aktivitas bajak laut di Nusantara berkaitan dengan kebiasaan orang Melayu, '*the prevalence of piracy of the Malayan coast is an evil of ancient date, and intimately connected with the Malayan habits. The old Malayan romances, and the fragment of their traditional history constantly refer with pride to political cruises an honourable occupation, worthy of being followed by young princes and nobels*' (Raffles, 1976: 232). Sumatera juga tidak lepas dari kegiatan bajak laut terutama pada abad ke-18 hingga abad ke-19.

Sumatera merupakan wilayah yang ramai dengan kegiatan perdagangan dan pelayaran, bahkan sejak masa Sriwijaya. Belanda yang mulai masuk ke Nusantara semakin membuat Sumatera semakin ramai dengan kegiatan perdagangan dan pelayaran. Kondisi ini didukung oleh munculnya kota pelabuhan yang berkembang seperti Medan, Jambi, Palembang, Padang, dan Bengkulu (Asnan, 2018: 9). Kegiatan perdagangan dan pelayaran yang ramai diduga secara tidak langsung menarik kelompok bajak laut melakukan perompakan di Sumatera dan sekitarnya pada abad ke-18 hingga abad ke 19.

Permasalahan yang muncul mengenai perdagangan dan pelayaran di Sumatera terbentuk menjadi wilayah ramai serta penting. Aktivitas bajak laut yang muncul di Sumatera dan sekitarnya pada abad ke-18 dan abad ke-19. Se jauh mana orang Sumatera juga terlibat dalam perompakan pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Penelitian bertujuan menjabarkan mengenai aktivitas bajak laut di Sumatera yang selama ini kajiannya sangat sedikit. Pendekatan sejarah digunakan untuk mengupas mengenai aktivitas bajak laut di Sumatera selama abad ke-18 hingga abad ke-19.

2. METODE

Pembahasan mengenai bajak laut di Sumatera abad ke-18 dan ke-19 dimulai dengan studi pustaka sebagai studi komparasi dalam menjelaskan fenomena-fenomena yang sama atau memiliki kemiripan dengan objek kajian, tetapi berbeda lokasi atau periodisasi waktunya (Syamsudin, 2007). Dalam rangka menggali informasi berkaitan dengan bajak laut di Sumatera abad ke -18 dan ke-19, maka dilakukan observasi (Basuki, 2006). Observasi ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi yang lebih utuh tentang bajak laut di Sumatera serta kondisi yang melatarbelakangi kemunculan bajak laut (Koentjaraningrat, 1997).

Penelitian juga menggunakan metode sejarah, ada empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi yang diuraikan (Gottschalk, 1983: 32). Tahap pertama dalam penelitian ini adalah heuristik atau pengumpulan sumber penelitian. Sumber diambil dari tulisan yang relevan dengan penelitian diambil dari buku, disertasi, jurnal, makalah, dan pustaka lain. Sumber ini diperoleh dari perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, perpustakaan Jawa Tengah, dan internet. Setelah semua sumber terkumpul selanjutnya dilakukan kritik

terhadap sumber tersebut. Kritik ekstern untuk memperoleh sumber yang otentik maupun kritik intern untuk memperoleh sumber yang kredibel. Tahap yang ketiga dalam penelitian sejarah adalah interpretasi. Pada tahap ini dituntut kecermatan objektif, terutama dalam hal interpretasi. Karya studi ini dibatasi oleh ruang lingkup spasial mencakup wilayah Sumatera dan sekitarnya. Lingkup temporal mencakup periode abad ke-18 sampai abad ke-19. Hasil analisis diatas kemudian dihubungkan dan direkonstruksi menjadi sebuah artikel tentang Bajak Laut di Sumatera Abad ke-18 dan ke-19.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan di Sumatera dan Selat Malaka

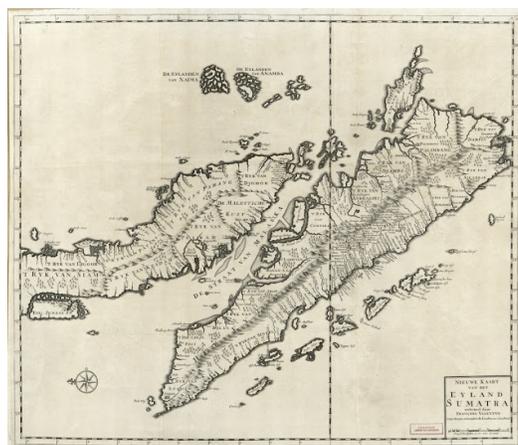
Perdagangan di Sumatera tentu tidak dapat dipisahkan dari Selat Malaka. Perdagangan pesisir dan pelayaran di Sumatera serta Selat Malaka telah ramai sejak lama. Wilayah Sumatera dan Selat Malaka menjadi penghubung jalur laut antara wilayah Asia Timur dengan Asia Barat. Jalur laut dimulai dari Cina kemudian Indonesia melalui Selat Malaka dan India, setelah itu menuju Teluk Persia kemudian melalui Suriah ke Laut Tengah atau ke Laut Merah melalui Mesir. Jalur Mesir akan mengantarkan ke Laut Tengah (Leirissa, 1999: 12-13). Selat Malaka dan Sumatera merupakan jalur pelayaran serta perdagangan yang penting bagi pedagang yang akan melintasi bandar-bandar penting di sekitar Samudera Hindia dan Teluk Persia. Selat Malaka dan Sumatera merupakan pintu gerbang ke jalan perdagangan Barat dan Selatan Cina serta sebagai jalur perdagangan Timur menuju Cina (Ambari, 1976: 7). Selat Malaka didukung oleh keberadaan kota pelabuhan besar di pantai barat dan timur Sumatera. Kota pelabuhan yang dimaksud antara lain Sriwijaya, Muara Jambi, Kota Cina, dan Singkel (Suryani, 2013: 805). Barus (*Po-shu*) juga merupakan kota pelabuhan penting di Sumatera sebelum era Sriwijaya. Barus merupakan sebuah negeri yang menghasilkan kemenyan dan kapur barus. Barus telah memiliki hubungan dagang dengan Cina, terlihat dari catatan kuno Cina yang mencatat mengenai Barus. Kota pelabuhan Barus berlokasi di bagian utara (timur laut) pantai timur Sumatera (Asnan, 2018: 6).

Sriwijaya merupakan kota pelabuhan penting dalam jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka sejak abad ke-7. Sriwijaya merupakan pelabuhan transit dagang yang memiliki letak strategis di Selat Malaka. Sriwijaya menjadi pelabuhan penting dalam jalur perdagangan melalui laut, yang disinggahi oleh pedagang dari berbagai bangsa. Pedagang Cina dan Arab mendatangi Sriwijaya sejak abad ke-7. Pedagang Arab dan Cina juga tinggal dalam waktu lama di Sriwijaya (Suryani, 2013: 806). Menurut berita dari Cina dan Arab, komoditas yang diperdagangkan di Sriwijaya berupa cengkeh, pala, kapulaga, pinang, kayu gaharu, kayu cendana, kapur barus, gading, timah, rempah-rempah, penyu, perak, dan emas. Barang-barang tersebut oleh pedagang asing dibeli atau ditukar dengan porselen, kain katun, dan kain sutera (Notosusanto, 1984: 61). Posisi strategis Sriwijaya di Selat Malaka setelah keruntuhannya diteruskan oleh kota pelabuhan Pasai maupun Malaka.

Pada abad ke-10, pedagang Arab dan Persia telah mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di Aceh untuk melakukan transaksi perdagangan. Aceh menjadi pusat perdagangan terbesar di wilayah timur Sumatera untuk para pedagang muslim. Aceh juga berkembang menjadi pusat pengembangan keilmuan Islam (Reid, 1969). Pada abad ke-13, Kesultanan Samudera Pasai menjadi pusat perdagangan penting di wilayah pantai timur Sumatera. Aliansi antara Pasai dan Malaka berakibat pada semakin ramainya hubungan perdagangan antara Pasai dan Malaka. Wilayah ini merupakan dua bandar dagang utama di Selat Malaka pada abad ke-15. Periode ini sebagai periode penting dari terbentuknya aliansi Melayu Sumatera dan Semenanjung Malaya (Purwanto, 2017: 217).

Pada abad ke-15, Malaka muncul menggeser kedudukan Pasai (Aceh) dalam bidang perdagangan internasional. Malaka memiliki letak lebih strategis dan lebih menguntungkan. Malaka berusaha agar persediaan barang-barang dagangan atau kebutuhan hidup di wilayahnya tetap terjamin. Malaka berusaha menumbuhkan sistem birokrasi yang dapat mendukung perekonomian Malaka menjadi lebih maju (Iskandar, 2017: 38-39). Malaka juga mengirimkan ekspedisi militer ke negeri-negeri yang dianggapnya penting untuk dikuasai karena menghasilkan barang-barang yang sangat dibutuhkan (Iskandar, 2005: 181). Malaka menguasai wilayah Kampar di pantai timur Sumatera yang ditaklukkan karena daerah ini merupakan penghasil merica dan merupakan pintu keluarnya emas dari daerah pedalaman Minangkabau. Wilayah Siak juga ditaklukkan dan dikuasai karena menghasilkan emas (Roelofsz, 1962: 30). Malaka pada masa itu memiliki peranan penting dalam perdagangan merica dan rempah-rempah.

Tumasik (Singapura) juga turut berkembang pada masa kekuasaan Malaka. Posisi Singapura yang berada di ujung Semenanjung Malaya menjadikannya sebagai tempat yang strategis dalam jalur perdagangan dan lalu lintas jalur laut. Singapura menjadi tempat yang penting di wilayah Asia Tenggara karena posisinya yang strategis itu. Singapura selalu disinggahi para pedagang dan juga menjadi rebutan kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan di sekitarnya, dan kemudian oleh kaum penjajah (Saefullah, 2016: 423).



Gambar. 1. Peta Sumatera dengan Semenanjung Melayu dan Selat Malaka yang dibuat oleh Valentijn François pada tahun 1726. (sumber: <http://www.abesagara.com/>)

Kesultanan Aceh berkembang pesat sejak abad ke-16 dan mencapai puncaknya pada abad ke-17 (Purwanto, 2017: 217). Aceh mempunyai beberapa pelabuhan perdagangan yang besar untuk bersaing dengan pedagang Portugis, Spanyol, Perancis, Belanda, Inggris, Cina, dan India. Mereka bersaing untuk merebut hegemoni politik dan ekonomi di kawasan Malaka, terutama dalam bidang perdagangan (Marsden, 2008). Kota pelabuhan Aceh memiliki komoditas-komoditas yang diperdagangkan berupa getah, lada, beras (padi), kapas, rotan, pinang, tembakau, kopi, kapur, kayu putih, serbuk emas, dan timah. Lada dan pinang adalah komoditas utama yang dihasilkan di Aceh (Reid, 1969). Kota pelabuhan Aceh memberikan kontribusi setengah kebutuhan lada di dunia pada masa itu (Reid, 1995).

Pada abad ke-17, kota pelabuhan Jambi merupakan wilayah kaya di Sumatera. Jambi memiliki kekuatan yang sebanding dengan Palembang dan Johor pada saat itu. Jambi meraih keuntungan hingga 30 - 35 persen dari lada yang dijual. Jambi memperoleh lada dari daerah hulu seperti Tanjung, Kuamang, Sumai, dan Muara Tembesi (Locher-Scholten, 2008: 44). Pedagang dari Portugis, Cina, Inggris, dan Belanda merupakan pembeli lada di Jambi. Perdagangan lada saat itu berkembang dalam dua bentuk, yaitu sistem barter dan sistem tunai (Arman, 2018: 92).



Gambar. 2. Menggambarkan kondisi pelayaran di Selat Malaka pada sekitar abad ke-18, dilukis oleh Valentijn François. (Sumber: <http://www.abesagara.com/>)

Palembang berkembang pesat perekonomiannya sejak abad ke-17. Palembang memiliki posisi yang sangat strategis dan ditopang pemerintahan yang stabil. Palembang menghasilkan komoditas yang sangat dibutuhkan oleh pasar domestik maupun internasional. Perekonomian di Palembang pada umumnya bergantung pada hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pengumpulan hasil hutan, dan tambang. Komoditas primadona yang dihasilkan dari Palembang adalah lada dan timah (Rochmiatun, 2016: 184). Palembang berkembang menjadi kota pelabuhan yang cukup penting di Selat Malaka sehingga banyak dikunjungi pedagang dari mancanegara.

Seiring dengan kedatangan kolonialis Belanda maka pusat-pusat maritim di Sumatera mengalami perubahan. Wilayah Medan, Jambi, Palembang, Padang, dan Bengkulu berkembang sebagai kota pelabuhan yang ramai. Aktor-aktor pendukung budaya maritim di daerah itu terdiri dari orang Eropa, Cina, dan timur asing (Asnan, 2018: 9). Sumatera pada masa abad ke-18 hingga abad ke-19 tentu semakin ramai dengan aktivitas perdagangan laut.

Aksi Bajak Laut di Sumatera

Kegiatan pelayaran dan perdagangan yang ramai di wilayah Sumatera maupun Selat Malaka mengundang bajak laut untuk melakukan perompakan. Bajak laut telah ada sejak abad ke-7 di wilayah Sumatera, yang terus berkembang pesat di masa kolonialisme. Bajak laut di Sumatera semakin meningkat setelah kedatangan bangsa Eropa. Pesisir Sumatera dan laut Selat Malaka merupakan tempat favorit terjadinya aksi perompakan.

Pada abad ke-18, diberitakan bahwa semakin marak peristiwa perompakan di perairan Selat Bangka dan Sungai Musi oleh para bajak laut (elanong). Residen Palembang telah berkali-kali mengajukan protes kepada Sultan Muhamad Bahauddin (Sultan Palembang, 1776-1804) tentang hal ini. Kesultanan Palembang telah berulang kali menghalau bajak laut dari kawasan perairan Selat Bangka dan Sungai Musi. Namun usaha Kesultanan tidak membuat takut para bajak laut, sehingga bajak laut kembali melakukan perompakan (Rochmiatun, 2016: 188). Residen Palembang melakukan protes akibat aksi bajak laut yang sering mengganggu kapal dagang milik Belanda. Kapal dagang Belanda yang bermuatan timah dari Bangka sering dirompak oleh bajak laut (Furnivall, 2009: 214).

Kelompok bajak laut yang biasanya beroperasi di Pantai Malaya dan perairan Riau berpindah mengadakan perompakan di sekitar Selat Malaka dan pantai timur Sumatera. Bajak laut itu umumnya berasal dari pangkalan lanun di Kalimantan Utara yang berpusat di Teluk Marudu dan Tempasuk. Bajak laut yang datang di perairan Riau ini merupakan akibat tindakan Belanda yang menguasai perdagangan timah. Sebelum kedatangan Belanda, perdagangan timah dikuasai oleh orang Bugis. Kekuatan bajak laut di perairan Riau dan pantai timur Sumatera diperkuat dengan didirikannya pangkalan di daerah Reteh (antara muara sungai Jambi dan Indragiri). Menurut laporan pemerintah Hindia Belanda, bajak laut di Reteh mampu mengerahkan 1.000 orang laki-laki bersenjata. Kelompok bajak laut di Reteh memiliki 10 hingga 12 buah kapal, masing-masing berukuran 8 hingga 10 koyang (16-20 ton) dengan awak kapal 50-80 orang dan dipersenjatai dengan satu meriam kaliber besar ditambah dua meriam kaliber kecil. Pangkalan bajak laut di Reteh pada setiap tahunnya melakukan aksi perompakan di perairan sekitarnya. Pangkalan di Reteh digunakan sebagai batu loncatan sehingga wilayah operasi mereka semakin luas (Lapian, 2011: 202-203).

Pada pertengahan abad ke-18, pemerintah Hindia Belanda menyebutkan bahwa Suku Laut Melayu sering melakukan perompakan di Selat Malaka. Suku Laut Melayu disebut sebagai pengganggu (perompak) jalur perdagangan yang dilalui kapal Belanda (Amrifo, 2014: 191). Pada 1784, sebuah skuadron Angkatan Laut Belanda dikirim ke Nusantara untuk memperkuat armada VOC. Pasukan ini berhasil mengalahkan bajak laut Bugis di Selat Malaka (Vlekke, 2008: 263). Usaha pemerintah kolonial Belanda memerangi bajak laut ternyata tidak mudah dan bajak laut masih terus berkeliaran di tahun-tahun berikutnya di Selat Malaka dan sekitarnya. Pada akhir abad ke-18, bajak laut (Illanos) dari Kepulauan Sulu membangun benteng di selatan Sumatera. Mereka melakukan aksi perompakan di sekitar Selat Sunda. Bajak laut tersebut dengan leluasa melakukan perompakan kapal-kapal yang melintasi Selat Sunda (Vlekke, 2008: 230). Pada masa yang sama, bajak laut Iranun dari Filipinan Selatan mendirikan pangkalan di Riau dan sepanjang pantai timur Sumatera. Mereka melakukan aksi perompakan di pantai dan selat, sehingga mengganggu lalu lintas pelayaran. Bajak laut Iranun tertarik dengan wilayah ini karena kevakuman kekuasaan di daerah itu akibat menurunnya pengaruh *Dutch East India Company* (VOC) dan melemahnya kekuasaan Sultan Johor (Amirell, 2019: 99).



Gambar. 3. Bajak Laut Iranun pada abad ke-19
(sumber: Xu Ke. Contemporary Maritime Piracy in Southeast Asia)

Pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, Kesultanan Palembang menghadapi bajak laut dari Lingga yang dikomandani oleh Panglima Ramim, Hanun, dan Aru Mampu yang merupakan anak-anak dari Raja Bugis. Kelompok bajak laut berusaha untuk mengambil alih dan merampas timah yang telah ditambang oleh pihak Kesultanan. Bajak laut mengacaukan hubungan ekonomi antara Palembang dan pemerintah Hindia Belanda. Palembang dirugikan karena timah yang ditambang telah dirampas oleh bajak laut. Pemerintah kolonial Belanda kehilangan hak monopoli timah di wilayah Kesultanan Palembang. Bangka Belitung juga merupakan kawasan yang tidak terpisahkan dari jaringan perompakan dan penjarahan para bajak laut. Kedatangan bajak laut di Bangka Belitung memberikan dampak negatif bagi ekonomi masyarakat (Ilham, 2017: 201-202).

Pada awal abad ke-19, sering terjadi perompakan di perairan Selat Bangka dan pantai timur Sumatra. Raden Jafar (seorang bangsawan Palembang) merupakan pimpinan bajak laut tersebut. Ia merupakan bajak laut yang paling terkenal di Palembang pada masa itu. Kelompok bajak laut Raden Jafar memiliki pangkalan di Bangka dan

Belitung. Bajak laut dalam melakukan perompakan sering merampas komoditas timah, lada, dan beras. Kesultanan Palembang membutuhkan kekuatan hingga ribuan serdadu untuk menaklukkan kelompok bajak laut Raden Jafar. Pada masa itu, juga ada kelompok bajak lain yang dipimpin oleh Panglima Raja dari Belitung. Bajak laut pimpinan Panglima Raja memiliki wilayah perompakan di sekitar perairan Belitung (Rochmiatun, 2016: 188). Pada masa ini, bajak laut Aceh juga melakukan perompakan dengan membajak kapal-kapal Inggris, Belanda, Amerika Serikat, dan Italia (Vlekke, 2008: 357). Masa ini juga terjadi aksi perompakan yang masif di sekitar Selat Malaka. Aksi perompakan oleh bajak laut ini membuat kota-kota pelabuhan di wilayah Aceh mengalami kemunduran (Subhan, 2010: 4).

Pada 1825, kelompok Orang Laut melakukan aksi perompakan di Kepulauan Riau Lingga. Orang Laut menganggap bahwa aksi perompakan merupakan tradisi hidupnya, dimana tradisi ini sangat bertentangan dengan prinsip yang dianut pemerintah Hindia Belanda (Amirell, 2019: 100). Pada 1831, kapal perang Amerika Serikat dan Inggris menyerang dan menghujani desa-desa di pantai Aceh dengan tembakan. Kapal perang Amerika Serikat dan Inggris melakukan penyerangan akibat dari bajak laut Aceh yang sering menyerang kapal-kapal Eropa. Namun tindakan agresif dari negara-negara Eropa ternyata tidak meyurutkan aktivitas perompakan bajak laut Aceh (Vlekke, 2008: 335). Pada 1838, pemerintah Hindia Belanda mengadakan pembasmian perompak laut secara besar-besaran di perairan Belitung. Pasukan pembasmi bajak laut tersebut dipimpin oleh J.J Roy. Kegiatan penumpasan bajak laut ini membuat peran bajak laut yang disegani menjadi meredup (Rochmiatun, 2016: 196).

Pada 1840an, pemerintah kolonial Hindia Belanda berusaha mengambil alih kekuasaan di Kepulauan Riau dari tangan bajak laut. Pemerintah Hindia Belanda melibatkan raja dan bangsawan lokal dalam sistem perdagangan kolonial agar para penguasa lokal tersebut tidak lagi menjadi sponsor aksi perompakan. Pemerintah Hindia Belanda semakin gencar melakukan patroli penumpasan bajak laut dengan kekuatan Angkatan Laut. Operasi penumpasan bajak laut sering melakukan pengkapan para perompak dan menyerbu pangkalan bajak laut. Operasi ini cukup berhasil sehingga menekan jumlah bajak laut dan beberapa bajak laut meninggalkan Kepulauan Riau (Amirell, 2019: 112). Diwaktu yang sama, Angkatan Laut Inggris dengan beberapa ekspedisi mampu mengalahkan bajak laut yang beroperasi di Kepulauan Melayu, terutama di sepanjang Selat Malaka (Berlusconi, 2014: 303). Namun ekspedisi Inggris tidak mampu membuat semua bajak laut berhenti melakukan aksi perompakan.

Orang Cina (kelompok Ghee Hin, Hai San, dan Toh Peh Kong) terlibat dalam kegiatan perompakan di sekitar Selat Malaka pada 1872-1873. Mereka telah merampas harta benda, membakar rumah-rumah, dan melukai serta membunuh penduduk lokal. Mereka juga menyerang dan merampok hasil tangkapan nelayan di perairan Malaka (Ahmad, 2016: 53). Pada akhir abad ke-19, aktivitas perompakan terjadi secara leluasa di pesisir dekat Selat Melaka. Aktivitas bajak laut ini mengancam keselamatan dan aktivitas pedagang di perairan Selat Melaka. Bajak laut tidak hanya menyerang kapal atau perahu lokal, tetapi berani merompak kapal-kapal Eropa yang berdagang di perairan Selat Malaka. Kapal Eropa itu diantaranya kapal-kapal Inggris terdiri dari Malacca, Commerece, Sultana, Lord Melbourne, Young Queen, serta Anna dan kapal-kapal Perancis terdiri dari Sabine serta A.S. Friendship (Ahmad, 2016: 51).

Pada abad ke-19, bajak laut yang bermarkas di Sumatera dan kepulauan Riau Lingga tidak jarang mendapat sponsor atau dipimpin penguasa lokal. Raja atau bangsawan dari kerajaan lokal di Sumatera sering menjadi sponsor atau pemimpin aksi perompakan. Kelompok ini sering melakukan ekspedisi besar dengan kekuatan puluhan kapal dan ratusan pasukan. Mereka menyerang kapal-kapal di laut dan di pelabuhan. Mereka juga tidak segan menyerbu daerah pesisir dengan tujuan menangkap budak (Amirell, 2019: 106-107). Pada masa ini, pemerintah Hindia Belanda mendirikan pos militer di Pulau Nias, dekat pantai barat Sumatera. Pos militer didirikan untuk melindungi penduduk dari serangan bajak laut Aceh. Bajak laut sering menculik penduduk untuk dijadikan budak (Vlekke, 2008: 335). Bajak laut masih melakukan aktivitas perompakan pada masa ini, tidak hanya di panati timur Sumatera namun juga di Selat Malaka. Sumber lain menyebutkan bahwa, orang Bajo ternyata mengelilingi Pulau Sumatera untuk melakukan aksi perompakan (Bustami, 2004: 272). Orang Bajo beberapa kali disebutkan sebagai bajak laut, yang memiliki pangkalan di perairan Sulawesi. Namun catatan perompakan orang Bajo di Selat Malaka dan Sumatera tidaklah banyak.

Orang Sumatera Sebagai Bajak Laut

Orang Sumatera tidak hanya menjadi korban dari bajak laut, namun sebagian orang Sumatera juga terlibat dalam aktivitas perompakan. Orang Suku Laut Melayu juga disebutkan sebagai bajak laut pada masa itu. Orang Suku Laut merupakan kelompok etnis tipe nomadik, yaitu cara sebuah komunitas yang menjalani hidup dengan mengandalkan sumber-sumber alam di tempat yang mereka diami sebagai medium untuk bertahan hidup dan berpindah dari satu laut ke laut lainnya (Marsanto, 2010). Orang Laut memiliki karakter bertempat tinggal dan melakukan segala aktivitas di rumah perahu atau sampan (Lenhart, 1997). Pada pertengahan abad ke-18, dalam perjanjian persahabatan antara Belanda dan Johor, Suku Laut Melayu disebutkan sebagai pengganggu (perampok) jalur perdagangan laut di Selat Malaka (Amrifo, 2014: 191).

Pada 1786, seorang dari daerah Padang tercatat sebagai bajak laut yang disegani, namun pangkalannya tidak di Sumatera. Sebuah kelompok besar bajak laut bermarkas di Teluk Sukadana, dengan pemimpin bernama Datu Camerang (Raja Sabrang) yang merupakan putra raja muda Padang. Datu Camerang menempatkan sejumlah

orang kepercayaannya di daerah sekitarnya untuk membangun dan mempertahankan pengaruh. Datu Camerang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun sebagai pimpinan kelompok bajak yang berkeliaran di pantai Kalimantan sebelum datang ke Sukadana (Atsushi, 2010:83). Datu Camerang memiliki armada yang terdiri dari 24 kapal yang ditempatkan di Pulau Panambangan, Kepulauan Karimata. Datu Camerang tinggal di Panambangan bersama dengan 900-1000 pasukan bajak laut dan pandai besi. Panambangan merupakan pangkalan utama untuk aktivitas perompakan. Sukadana merupakan tempat untuk pengadaan makanan dan kebutuhan hidup lainnya. Pasukan Datu Camerang yang berada di Sukadana juga melakukan aksi perompakan terhadap kapal barang yang melintas di sekitar perairan Sukadana (Atsushi, 2010: 86).

Pada awal abad ke-19, tercatat seorang dari Palembang menjadi pimpinan pasukan bajak laut. Raden Jafar (seorang bangsawan Palembang) yang menjadi pemimpin kelompok bajak laut yang paling terkenal di Palembang. Mereka sering melakukan perompakan di perairan Selat Bangka dan pantai timur Sumatera serta merampas komoditas timah, lada, dan beras. Kelompok bajak laut Raden Jafar memiliki pangkalan di Bangka dan Belitung. Kesultanan Palembang membutuhkan kekuatan besar untuk dapat menaklukkan kelompok Raden Jafar. Pada masa itu juga ada kelompok bajak lain yang dipimpin oleh Panglima Raja dari Belitung, dengan wilayah perompakannya sekitar perairan Belitung (Rochmiatun, 2016: 188). Pada masa ini, tercatat bahwa koalisi pedagang muslim dari Reth (Riau) dan Kepulauan Lingga, bersama dengan pedagang Sambas, Kota Waringin, Kepulauan Sulu, serta Mindanao melakukan aksi perompakan. Mereka melakukan perang di laut dan datang merampok di pantai-pantai Jawa. Mereka juga menyerang konvoi-konvoi yang melewati jalan raya Daendels (jalur pantai utara Jawa) yang berada di dekat pantai (Lombard, 1996: 78).

Pada 1831, orang Aceh diberitakan sebagai bajak laut yang sangat tangguh. Bajak laut Aceh sering melakukan perompakan terhadap kapal-kapal Eropa dan Amerika. Pemerintah Eropa dan Amerika sangat tiding senang dengan perlakuan bajak laut Aceh karena mengganggu kelancaran perdagangan. Kapal perang Amerika Serikat dan Inggris menyerang dan menghujani desa-desa di pantai Aceh dengan tembakan. Tindakan ini sebagai aksi balasan terhadap perlakuan orang Aceh. Namun tindakan agresif dari negara-negara yang kapalnya diserang ternyata tidak meyurutkan aktivitas perompakan bajak laut Aceh (Vlekke, 2008: 335).

Pada 1859, Pak Ranti seorang bajak laut dari Pulau Galang, Kepulauan Riau melakukan aksi perompakan di Singapura. Pak Ranti menyerang sebuah kapal dan menewaskan enam orang awak kapal. Pada 1861, Pak Ranti menyerahkan diri kepada polisi Singapura (Amirell, 2019: 122). Pada periode 1860an hingga 1870an, bajak laut Aceh secara sporadis melakukan aksi perompakan di sepanjang pantai timur dan barat Sumatera, terutama wilayah di selatan Aceh (Amirell, 2019: 154). Pada 1876, bajak laut Aceh merompak sebuah junk Cina, Sin Soon Seng, di lepas pantai Pulau Weh. Bajak laut Aceh menyerang secara brutal dan menjarah muatan kapal (Amirell, 2019: 155). Pada 1883, bajak laut pimpinan Teuku Imam Muda dari Teunum memimpin sebuah aksi perompakan. Kapal uap Inggris, Nisero, diserang dan dua puluh sembilan awak kapal ditahan. Aksi perompakan ini terjadi di Panga, pantai barat Aceh (Amirell, 2019: 156).

Pada 1885, pasukan pemerintah Hindia Belanda yang terdiri dari tentara *Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger* (KNIL) melakukan penumpasan bajak laut di pantai timur Sumatera (Indonesia-Dutch Colonial Heritage, 2008: 6). Dimungkinkan bahwa para bajak laut yang diserang tersebut ialah orang-orang Sumatera. Pada 1886, bajak laut pimpinan Teuku Umar menyerang kapal uap *Hok Canron* di Rigas, pantai barat Aceh. Bajak laut menjarah muatan kapal, menyandra beberapa awak kapal, dan tiga anak buah kapal dibunuh (Amirell, 2019: 156). Pada 1893, bajak laut dibawah kendali Rajah Kongsee Aceh melakukan perompakan terhadap kapal milik Hok Canton. Pasukan bajak laut ini berasal dari pantai Idi, Aceh. Bajak laut berhasil membunuh dua puluh awak kapal dan dua puluh awak kapal lainnya tenggelam di laut. Bajak laut membawa uang senilai 5.000 gulden serta menangkap delapan sandera. Pada 1897, pasukan Rajah Kongsee Aceh menyerang kapal tentara Inggris di Pegu. Bajak laut ini berhasil menewaskan tiga perwira Inggris dan lima prajurit Inggris dari Asia. (Amirell, 2019: 157).

Pada abad ke-19, pemerintah kolonial Hindia Belanda menyebut bahwa orang Aceh sebagai bajak laut dan wilayah Aceh disebut sebagai sarang bajak laut. Orang Aceh menjadi bajak laut akibat faktor agama (Islam) yang menganggap bangsa Eropa sebagai bangsa kafir (beragama Nasrani) sehingga layak untuk diserang. Orang Aceh juga didukung dengan kondisi geografis wilayah Aceh yang strategis sehingga mempermudah aksi perompakan. Bajak laut orang Aceh menciptakan sistem perompakan secara rutin dan melakukan perburuan budak dengan menangkap penduduk negeri tetangga yang non-muslim. (Amirell: 2019: 154)

Pada masa ini, bajak laut Aceh sering melakukan perompakan di Pulau Nias. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan pos militer di Pulau Nias, dekat pantai barat Sumatera. Pos militer ini difungsikan untuk melindungi penduduk dari serangan bajak laut Aceh. Bajak laut sering melakukan penculikan terhadap penduduk Nias. Bajak laut kemudian menjadikan penduduk Nias sebagai budak (Vlekke, 2008: 335). Meskipun berbagai usaha penumpasan dilakukan oleh orang Barat, bajak laut Aceh masih melakukan perompakan. Bajak laut Aceh masih sering merompak kapal-kapal Inggris, Belanda, Amerika Serikat, dan Italia (Vlekke, 2008: 357).

4. PENUTUP

Bajak laut sebagai bentuk fenomena yang berjalan berdampingan dalam perkembangan manusia. Bajak laut memiliki makna negative dari zaman kolonial hingga kekinian. Catatan mengenai aktivitas bajak laut paling awal di

dunia pada tahun 1350 SM. Bajak laut terus berkembang di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara yang telah terdapat aktivitas bajak laut sejak abad ke-1. Bajak laut di Nusantara tercatat pada abad ke-5, dimana perkembangan bajak laut menyebad di seluruh Nusantara. Orang Eropa yang berdatangan ke Nusantara membuat aktivitas bajak laut di meningkat, termasuk juga di wilayah Sumatera. Bajak laut di Sumatera semakin bertambah banyak juga akibat dari perkembangan kota-kota pelabuhan di Sumatera sebagai pusat perdagangan. Bajak laut sangat tertarik dengan kondisi ramainya perdagangan dan pelayaran di Sumatera. Bajak laut sering melakukan perompakan di laut dan tidak jarang menyerang pesisir pantai. Bajak laut sangat ditakuti oleh penduduk yang berada di pesisir Sumatera dan ditakuti oleh para pelaut. Penguasa lokal dan penjajah dari Eropa sangat dirugikan dengan aktivitas bajak laut karena sering mengganggu kapal-kapal dagang mereka. Penduduk Sumatera tidak hanya menjadi korban dari aktivitas bajak laut, namun beberapa orang Sumatera juga menjadi bajak laut. Mereka melakukan aksi perompakan terhadap kapal-kapal dagang Eropa dan tidak jarang menyerang penduduk di pesisir pantai Sumatera. Pembahasan mengenai bajak laut di Sumatera sangat menarik, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

5. REFERENSI

- Ahmad, Ibrahim; Faris Ahmad; dan Shariff bin Harun. (2016). "Piracy in the Malacca Strait Around 19th Century: The West Misconception". *JURNAL SULTAN ALAUDDIN SULAIMAN SHAH VOL 3 BIL 2*. hlm. 50-64.
- Ambari, Hasan. (1976). *Awal Masuknya Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Amirell, Stefan Eklöf. (2019). *Pirates of Empire: Colonisation and Maritime Violence in Southeast Asia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Amrifo, Viktor, dkk. (2014). "Sejarah Sosiologis Budaya Bernafkah Komunitas Adat Suku Duano". *Paramita*, Vol. 24 No. 2. hlm. 186-199.
- Arman, Dedi. (2018). "Perdagangan Lada di Jambi Abad XVI-XVIII". *Handep*. Vol. 1. No. 2. hlm. 81-105.
- Asnan, Gusti. (2018). "Landskap Budaya Maritim Sumatera". *Makalah* disajikan pada Seminar Nasional Budaya Bahari Sumatera Utara. Diselenggarakan oleh Program Studi Antropologi Sosial, Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
- Atsushi, Ota. (2010). "Pirates or Entrepreneurs? The Migration and Trade of Sea People in Southwest Kalimantan, c. 1770-1820". *Indonesia*, No. 90, *Trans-Regional Indonesia over One Thousand Years*.
- Basuki, Sulistyio. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Berlusconi, Giulia. (2014). "Piracy: History" dalam Beare M.E. (Ed.). *Encyclopedia of Transnational Crime and Justice*. London: SAGE Publications.
- Braddel, R. (1980). "A Study of Ancient Times in the Malay Peninsula and the Straits of Malacca" *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*.
- Bustami, Abd. Latif. (2004). "Folklor Kangean: Suatu Kajian Cerita Bajak Laut (Lanun) Sebagai Sumber Sejarah Kawasan". *BAHASA DAN SENI*, Tahun 32, Nomor 2. hlm. 267-285.
- Furnivall, J. S. (2009). *Hindia Belanda*. Jakarta, Freedom Institute.
- Gottschalk, Louis. (1983). *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Heritage, Indonesia-Dutch Colonial. (2008). *Het Kononklijk Nederlands Oost-Indisch Leger KNIL Some Remarks About Inception, Organization and Feats of Arm of The Royal Ditch East-Indian Army*.
- Ilham, Muhammad. (2017). "Diplomasi Politik Kesultanan Palembang dan Kolonial Belanda Tanggal 23 Mei 1803". *Medina-Te*, Vol. 13 Nomor 2. hlm. 188-204.
- Iskandar, Mohammad. (2005). "Nusantara dalam Era Niaga sebelum Abad ke-19". *WACANA*, VOL. 7 NO. 2. hlm. 175 - 190.
- Iskandar, Mohammad. (2017). "Kurun Niaga dan Keruntuhan Tradisi Maritim di Jawa 1500-1680". *Abad Jurnal Sejarah*, Volume 1, Nomor 2. hlm. 33-48.
- Ke, Xu. (2006). "Contemporary Maritime Piracy in Southeast Asia". *Doctor Dissertation* National University of Singapore.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lapian, Andrian B. (2011). *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut, Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Depok: Komunitas Bambu.
- Leirissa, dkk. (1999). *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Lenhart, Lioba. (1997). "Orang Suku Laut: Ethnicity and Acculturation", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Riau in transition*, 153, no: 4. hlm. 577-604.
- Lewis, Brenda Ralph. (2017). *Bajak Laut: Dari Blackbeard Hingga Perompak Somalia*, terjemahan Desy Natalia. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Locher-Scholten, Elsbert. (2008). *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial, Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*. Jakarta: KITLV.
- Lombard, Denys L. (1996). *Nusa Jawa Silang Budaya*. Jilid 2. Terj. Jakarta: PT. Gramedia.

- Marsanto, Khidir. (2010). "Orang Suku Laut dan Orang Melayu di Kepulauan Riau: Sebuah Tafsir Deskriptif-Etnografis". *Antropologi Indonesia*, Vol. 31 No. 3. hlm. 224-239.
- Marsden, William. (2008). *Sejarah Sumatra*. Depok: Komunitas Bambu.
- Notosusanto, Nugroho dan Marwati Djoned Poesponegoro. (1984). *Sejarah Nasional Jilid II*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwanto, Bambang. (2017). "Ruang Maritim Di Sisi Barat Pulau Sumatera Yang Diabaikan, Sebuah Tinjauan Historiografis". *Paramita: Historical Studies Journal*, 27 (2). hlm. 212-228.
- Raffles, T. S. (1976). *History of Java*, Jilid I. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Reid, Anthony. (1969). *The Contest for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands and Britain 1858-1898*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Reid, Anthony. (1995). *Witnesses to Sumatra: A Travellers' Anthology*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Rochmiatun, Endang. (2016). "Orang Laut, Bajak Laut, dan Raja Laut: Dinamika Kehidupan dan Kekuasaan dalam Naskah Kontrak Sultan-Sultan Palembang Abad 18-19". *Manuskripta*, Vol. 6, No. 1. hlm. 181-211.
- Roelofs, M.A.P Meilink. (1962). *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630*.
- Saefullah, Asep. (2016). "Tumasik: Sejarah Awal Islam di Singapura (1200-1511 M)". *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 14, No. 2. hlm. 419-456.
- Subhan, Muhammad. (2010). "Aceh Dan Pembangunan Kepelabuhanan: Perbandingan Aspek Sejarah Dan Kontemporari". *Prosiding dalam Aceh Development International Conference di Universiti Putra Malaysia*.
- Suryani, Ida. (2013). "Arti Penting Selat Malaka dan Selat Bangka Bagi Sriwijaya Dalam Memperlancar Perdagangan Antara Cina, India, dan Arab". *Prosiding dalam Seminar Pendidikan Nasional di Palembang*.
- Syamsudin, Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Vlekke, Bernard H.M. (2008). *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Indonesia.
- Warren, James F. (2007). "A Tale Of Two Centuries The Globalization of Maritime Raiding and Piracy in Southeast Asia at The End of The Eighteenth and Twentieth Centuries", dalam Peter Boomgaard (ed), *A World of Water: Rain, Rivers And Seas in Southeast Asian Histories*. Leiden: KITLV Press.